

## Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender

Linda Dwi Eriyanti

Dosen Fisipol Universitas Jember

**Abstract:** *This qualitative research is describes the strategic gender needs in the community PTPN XII Kebun Silosanen worker. While the specific purpose of this research is to find a model of women's empowerment based strategic gender needs. The location chosen for this is Silosanen coffee plantations managed by PTPN XII Silo Jember, citing the quiet absorption of labor in plantations is quite large, reaching 1479 people. Data collection methods used were interviews, observation, literature, documentation studies and focus group discussion.*

**Keywords:** *Women's Empowerment, Gender Strategic Needs, Organizing*

**Abstrak:** *Penelitian kualitatif ini akan mendeskripsikan tentang kebutuhan strategis gender pada komunitas pekerja PTPN XII Kebun Silosanen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model pemberdayaan perempuan yang berdasarkan kebutuhan strategis gender. Lokasi penelitian yang dipilih adalah perkebunan kopi Silosanen yang dikelola oleh PTPN XII Silo Jember yang membawahi 1479 orang pekerja. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, telaah literatur, dokumentasi dan focus group discussion.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan Perempuan, Kebutuhan Strategis Gender, Pengorganisasian*

Perbedaan akses terhadap pendidikan, perekonomian, politik, dan kesehatan menjadikan perempuan tersisih dalam berbagai segi kehidupan. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur masih lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yakni 50,54%. Namun demikian, dalam kehidupannya kondisi perempuan tidak lebih baik dari laki-laki. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tinggal di pedesaan 18,08 juta orang atau 14,70% pada September 2012, dan dari jumlah tersebut 70% diantaranya adalah perempuan. Sementara itu, di seluruh Indonesia, angka pengangguran terbuka perempuan juga lebih tinggi untuk kelompok umur 15-64 tahun yakni 7,63% dibanding 5,90% laki-laki yang menganggur. (BPS, 2011)

Konstruksi gender di masyarakat yang patriarkhis menempatkan perempuan pada posisi yang seringkali dirugikan. Perbedaan gender itu membawa dampak ketidakadilan bagi perempuan, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda (Fakih, 2008). Marginalisasi dan subordinasi yang ada di masyarakat dan dilegitimasi oleh negara dengan kebijakan yang tidak menganggap penting kebutuhan perempuan dan secara umum tidak berpihak pada perempuan telah mengakibatkan kemiskinan. Pelekatan stereotip negatif pada perempuan, mengakibatkan perempuan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan, dan kekerasan justru dianggap sebagai pihak penyebab kekerasan. Bahkan oleh aparat pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum untuk menjamin hak semua warganegara, termasuk perempuan. Kekerasan berupa pemerkosaan, pemukulan atau serangan fisik, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dan KB, kekerasan terselubung,

pelecehan seksual, menimpa perempuan dari berbagai usia, berbagai kelas sosial, di ruang publik, bahkan di dalam rumahnya sendiri.

Perempuan yang bekerja di ruang publik, karena masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan rumah tangga, maka ia harus menanggung beban kerja ganda, yakni tetap mengurus rumah tangga, dan masih harus bersaing dengan laki-laki di wilayah public dengan sistem yang masih menguntungkan laki-laki.

Sementara itu kehidupan perempuan yang tinggal di wilayah perkebunan juga tidak lepas dari permasalahan yang muncul akibat ketimpangan relasi gender.

Para tenaga kerja perkebunan, termasuk perempuan di perkebunan, sangat tergantung kepada perkebunan, maka secara tidak langsung kelangsungan hidup mereka sangat dipengaruhi oleh produktivitas di perkebunan begitu juga sebaliknya. Perkebunan juga sangat membutuhkan buruh yang murah untuk menjalankan produksinya. Peran ganda buruh perempuan perkebunan, baik sebagai buruh dan ibu rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan sosial ekonominya (<http://repository.upi.edu>).

Model pemberdayaan perempuan yang selama ini ada belum menyentuh kebutuhan strategis gender perempuan. Kebutuhan strategis gender muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat dan terkait dengan pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol. (<http://sulbar.bkkbn.go.id>). Kebutuhan strategis gender tidak lagi berorientasi pada bagaimana seseorang bisa menjalankan fungsi sesuai tugas dan peran gender masing-masing. Tetapi lebih kepada upaya membangun kesetaraan gender sehingga ketika akses dan kontrol terhadap kehidupan bagi perempuan dan laki-laki terbuka secara sama, maka kebutuhan praktis genderpun akan terpenuhi.

Pendekatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia dalam rangka peningkatan peran perempuan menurut Hubeis adalah:

1. Pendekatan kesejahteraan: pengembangan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga atau pemenuhan kebutuhan praktis gender perempuan yang terkait dengan pelaksanaan peran reproduksi (domestik) perempuan.
2. Pendekatan penyamaan hak: diarahkan pada upaya kesamaan pengembangan peran perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan seperti halnya laki-laki. Pelaksanaannya dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender yang memperhatikan tiga peran perempuan yakni peran produktif, reproduktif dan peran sosial.
3. Pendekatan anti kemiskinan: pemenuhan kebutuhan praktis gender yang dikaitkan dengan keperluan perempuan untuk meningkatkan peran produktifnya. Kegiatan usaha kecil yang memungkinkan perempuan memperoleh pendapatan.
4. Pendekatan efisiensi: adanya jaminan terjadinya proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien, kontribusi perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi.
5. Pendekatan penguatan: upaya pemberdayaan perempuan untuk mandiri. Subordinasi perempuan bukan hanya karena ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki tetapi juga sebagai akibat penindasan kolonial dan

neokolonial. Pemenuhan kebutuhan strategis gender dilakukan dengan mobilisasi dari bawah keatas, sedangkan pemenuhan kebutuhan praktis gender diarahkan sebagai upaya melawan penindasan.

6. Pendekatan gender: kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan mencakup kebersamaan dalam berbagi pekerjaan rumahtangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan keputusan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagi upah yang lebih adil (Hubeis, 2010).

Pemenuhan kebutuhan strategis perempuan dilakukan dengan berusaha mengatasi ketertinggalan perempuan di masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Mulyono, 2010). Kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan (Demartoto dan Budiarti, 2010)

Kebutuhan strategis berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain. Kebutuhan strategis gender juga meliputi perubahan hak-hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, persamaan upah, dan sebagainya (Dep. Kehutanan, 2005). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan strategis merupakan program pemberdayaan perempuan dalam memantapkan potensi yang memungkinkan perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di peran publik (Subhan, 2002).

Sedangkan unsur utama dalam proses pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (2001, dikutip Claros and Zahidi, 2005: 2-5), terdiri dari: 1. *Welfare* (Kesejahteraan) yang mencakup partisipasi ekonomi perempuan, pencapaian pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. 2. *Access* (Akses) terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. 3. *Consientisation* (Kesadaran) akan perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. 4. *Participation* (Partisipasi), yakni partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. (Claros dan Zahidi, 2005: 4). 5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan), dimana kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

### Metode Penelitian

Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja pada daerah perkebunan kopi Silosanen yang dikelola PTPN XII di Kecamatan Silo, yang penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1479 orang (Data Disbun, 2006)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan *purposive sampling* dan metode

snowball terhadap dinas terkait dengan pemberdayaan perempuan, Pengelola Perkebunan, LSM dan Ormas yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, perempuan dan laki-laki pekerja perkebunan, serta aparat desa setempat. Kedua, data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer.

Analisis data mengikuti model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992), yakni melalui proses *Data reduction, Data Displays, Conclusion Drawing /Verification*. Pertama, reduksi data dilakukan semenjak pengumpulan data dengan penyederhanaan klasifikasi data kasar di lapangan. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpeleksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general).

### **Kebutuhan Strategis Gender masyarakat**

Hasil Penelitian tahun pertama telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Buruh Perkebunan kopi di PTPN XII kebun Silosanen. Dari permasalahan tersebut diidentifikasi beberapa kebutuhan strategis gender bagi perempuan di wilayah perkebunan, yakni :

1. Kekuasaan/kontrol, yakni kemampuan untuk menentukan kegunaan dan fungsi atas sesuatu yang meliputi :
  - a. Sumberdaya, berupa sumberdaya alam (tanah, air, hutan), sumber pengetahuan dan informasi (buku, TV, Radio, Koran), finansial (uang, properti)
  - b. Ideologi, dimana seorang atau golongan masyarakat seringkali menjadi penentu, dukun, ataupun dipercaya, yang akhirnya mengatur bahkan seringkali menentukan benar atau salah nilai-nilai dan cara pandang/cara berpikir warganya.
  - c. Pasar, dengan memiliki kontrol atas pasar, berarti juga akan memiliki kendali atas sumberdaya alam dan uang.
2. Akses  
Budaya yang berkembang di masyarakat patriarkhi berdampak kepada peluang yang dimiliki perempuan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh keluarga, maupun yang ada dimasyarakat masih sangat terbatas
3. Kesadaran Kritis

Hingga saat ini belum terbangun kesadaran diri perempuan akan kesetaraan gender, yang berdampak kepada perempuan tidak berusaha untuk mengubah struktur patriarki di masyarakatnya.

4. Partisipasi

Di satu sisi, perempuan mendapatkan beban ganda, dimana mereka harus bertanggungjawab atas semua urusan di dalam rumah tangga, dan masih harus ikut mencari nafkah untuk keluarga dan beraktifitas di masyarakat. Namun demikian perempuan tidak mendapatkan tempat dalam aktifitas yang terkait dengan pengambilan kebijakan baik diruang domestik, yakni dalam lingkup rumah tangga, maupun di ruang publik tatau dalam masyarakat. Hal ini berakibat banyak kebijakan di tingkat bawah sampai atas yang tidak sensitif gender.

5. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan perempuan buruh perempuan masih sangat rendah, rata-rata hidup dibawah garis kemiskinan, dan dengan fasilitas hidup yang masih sangat terbatas. Mereka masih harus berhadapan dengan permasalahan marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotip negatif, beban ganda dan kekerasan.

Oleh karenanya perlu ada perubahan dalam masyarakat di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen yakni :

1. Perbaikan posisi perempuan terkait dengan sharing kekuasaan di keluarga maupun masyarakat.
2. Pengubahan status gender, peningkatan akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, di lingkup domestik maupun di ruang publik.
3. Pembangunan keesadaran perempuan dan laki-laki atas pentingnya kesetaraan dalam kehidupan dalam keluarga dan di masyarakat.
4. Keikutsertaan perempuan dalam setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring).
5. Pemenuhan kesejahteraan perempuan, yang akan terwujud ketika hak-haknya juga terjamin, yakni hak politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak untuk diperlakukan secara adil.

### **Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender**

Pemberdayaan perempuan buruh perkebunan PTPN XII kebun Silosanen dilakukan dengan peningkatan kesadaran kritis atas hak, penguatan, pengalihan kekuasaan, peningkatan partisipasi, serta menumbuhkan keseimbangan relasi di antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut secara teknis berupa :

#### **Sekolah Perempuan Berdaya**

Sekolah perempuan ini adalah upaya untuk membuka wawasan dan memberikan pengetahuan kepada perempuan buruh perkebunan. Dengan sekolah perempuan ini diharapkan akan terbangun pola pikir baru yang adil gender. Keadilan dan sensitifitas gender di masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kualitas

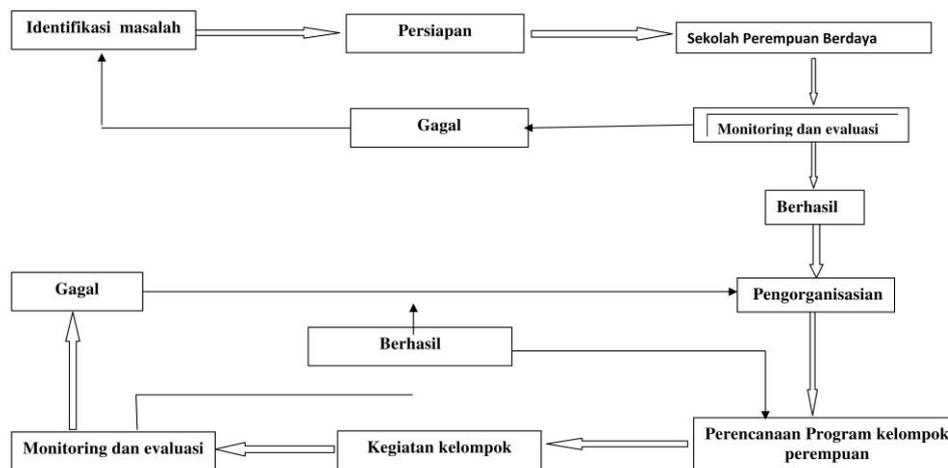
hidup perempuan, termasuk dalam pemenuhan-pemenuhan kebutuhan praktis perempuan.

Sekolah perempuan ini membutuhkan fasilitator yang memiliki pemahaman gender, pemahaman situasi dan kondisi perempuan di perkebunan Silosanen, juga memiliki semangat pengabdian, komitmen, dan empati yang tinggi. Peserta sekolah perempuan adalah buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, baik yang berasal dari buruh kebun, buruh pabrik, buruh bedeng, maupun mandor. Sekolah perempuan diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali, pada hari minggu selama 10 kali pertemuan.

**Pengorganisasian buruh perempuan**

Pengorganisasian buruh perempuan penting untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh Perempuan. Organisasi buruh ini diharapkan mampu menjadi : (1) media bagi para anggotanya untuk berbagi informasi, (2) untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, (3) Pencarian solusi bersama permasalahan yang ada, (4) sebagai media untuk menyebarkan kesadaran gender bagi perempuan di wilayah perkebunan PTPN XII kebun Silosanen, (5) wadah bagi perjuangan kepentingan kaum buruh ketika berhadapan dengan perusahaan.

Model Pemberdayaan Buruh Perkebunan Kopi PTPN XII Kebun Silosanen



Sumber: Diolah oleh penulis.

**Langkah 1 : Identifikasi Masalah**

Terjadi ketimpangan relasi gender masyarakat di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen, dimana terdapat Pembedaan Kontrol dan Akses antara perempuan dan laki-laki, di ranah domestik maupun diruang publik, termasuk di tempat mereka bekerja di perkebunan.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Akses dan Kontrol**

Sumberdaya	Akses		Kontrol	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan

Tanah	v	V	v	
Peralatan	v	V	v	
Uang kas	v	v	v	v
Sarana dan prasarana	v	v	v	
Pendapatan dari luar	v	v	v	
Pemilikan properti	v		v	
Kebutuhan dasar	v	v	v	
Pendidikan	v	v	v	
Pelatihan	v		v	
Kekuasaan politis/prestise	v		v	
Fasilitas kesehatan	v	v	v	
Peluang jabatan	v		v	
Gaji	v	v	v	
Tunjangan	v		v	
Cuti				
Kredit	v		v	
Keselamatan/kenyamanan kerja	v	v	v	

Sumber: hasil wawancara penulis.

**Tabel 2**  
**Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Akses dan Kontrol**

No	Faktor	Hambatan
1	<b>Politik</b>	Penentu kebijakan di semua tingkatan didominasi oleh laki-laki, sehingga, produk kebijakannya pun tidak sensitif gender.
2	<b>Ekonomi</b>	Sistem ekonomi yang kapitalistik menempatkan perempuan dalam keluarga sebagai aset yang dimiliki oleh laki-laki.
3	<b>Sosial</b>	Masyarakat menganggap berada dibawah tanggungjawab laki-laki, sehingga keputusan atau pemikiran laki-laki dianggap juga mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan.
4	<b>Budaya</b>	Ketidakadilan yang dialami perempuan akibat relasi antara laki-laki dan perempuan yang timpang dimasyarakat dianggap sebagai kewajaran dan bersifat kodrati.
5	<b>Hukum</b>	ada aturan dan produk perundangan-undangan yang melindungi hak-hak perempuan, namun tidak disertai perangkat yang memadai, seperti halnya pemahaman yang masih bias diantara penegak hukum dan terlebih lagi bagi masyarakat.

Sumber: hasil wawancara penulis

Terdapat perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat perkebunan, yang berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan.

**Tabel 3**  
**Aktifitas Reproduksi Masyarakat Perkebunan**

<b>Jenis Aktifitas Reproduksi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Anak laki2</b>	<b>perempuan</b>	<b>Anak perempuan</b>
Mengasuh Anak			v	
Memasak,			v	v
Mencuci Perabot Dapur			v	v
Mengambil Air,			v	
Mengambil Kayu Bakar,		v	v	v
Mencuci Baju,			v	v
Menyetrika Baju,			v	v
Membersihkan Rumah,		v	v	v
Membantu Belajar Anak	v		v	
Belanja Keperluan Sehari-Hari			v	
Mengantar Anak Sekolah			v	
Memperbaiki Rumah	v	v		
Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit	v		v	v
Mengantar Ke Klinik/Puskesmas/Posyandu	v		v	
Mencari/membuat obat alamiah/jamu			v	

Sumber: hasil wawancara penulis

**Tabel 4**  
**Aktifitas Produktif Buruh Perkebunan**

<b>Jenis Aktifitas Produktif</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>perempuan</b>
Pembibitan		v
Pemupukan	v	v

Dangir/menyiangi rumput	v	v
Memotong/merapikan cabang	v	
Pemetikan	v	v
Penyortiran		v
Buat lubang tanaman baru,	v	
Timbang	v	
Operator mesin pabrik	v	
Pemeliharaan peralatan pabrik	v	
Mencari rumput untuk sapi/kambing	v	v
Merawat sapi/kambing	v	v
Menanam sayur/buah di pekarangan		v

Sumber: hasil wawancara penulis

**Tabel 5**  
**Aktifitas Kemasyarakatan**

<b>Aktifitas Kemasyarakatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Anak laki-laki</b>	<b>perempuan</b>	<b>Anak perempuan</b>
Perkawinan	v	v	v	v
Pemakaman	v	v	v	v
Dasa wisma	v		v	
Pengajian	v		v	
PKK			v	
Posyandu			v	
Peringatan hari besar/selamatan	v		v	
Rapat desa/RT/RW	v			

Sumber: diolah dari hasil wawancara

### **Dampak Relasi Gender Bagi Kehidupan Perempuan Di Perkebunan**

Relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan berdampak kepada tidak terjaminnya hak-hak perempuan, diantaranya hak politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Sedangkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen berupa :

- a. Marginalisasi ekonomi
- b. Subordinasi
- c. Beban ganda

- d. Stereotip
- e. Kekerasan

### **Langkah II : Persiapan**

Langkah persiapan ini dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan beberapa perempuan dan atau laki-laki buruh perkebunan yang bisa menjadi tokoh kunci dalam proses pemberdayaan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender yang dilaksanakan di Kebun Silosanen. Tahapan yang dilakukan yakni :

1. Pemetaan masalah dari sudut pandang perempuan dan laki-laki, untuk menemukan persoalan yang betul-betul dimiliki oleh buruh perempuan perkebunan yang merupakan konstituen pengorganisasian;
2. Analisis bersama untuk pengenalan potensi masyarakat (laki-laki dan perempuan), merupakan upaya mengidentifikasi dan mengumpulkan kekuatan dan kemampuan ko-instituen yang menjadi obyek pengorganisasian untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri;
3. Membangun kesadaran awal, dimana proses peningkatan kesadaran perempuan, sebagai korban dalam hal ini diperlukan untuk membangkitkan semangat untuk perubahan;
4. Penyatuan gagasan dan ide;
5. Perumusan tujuan bersama yang mengacu kepada kebutuhan strategis gender laki-laki dan perempuan.

### **Langkah III: Sekolah Perempuan Berdaya**

#### 1. Metode

Metode dalam sekolah perempuan berdaya ini adalah partisipatoris, dimana dalam proses belajar yang melibatkan elemen-elemen:

- a. Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri.
- b. Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif
- c. Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik
- d. Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar
- e. Merencanakan pola pengalaman belajar
- f. Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik yang memadai
- g. Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar. (<http://www.kemsos.go.id>)

#### 2. Peserta

Peserta sekolah perempuan berdaya ini diprioritaskan bagi perempuan buruh Perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, tetapi dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan untuk mengikutsertakan laki-laki yang merupakan para suami mereka.

#### 3. Materi

- a. Gender dan kesetaraan
- b. Ketidakadilan gender

- c. Hak-hak perempuan
- d. Manajemen konflik
- e. Problem solving
- f. Analisis sosial dan SWOT
- g. Advokasi
4. Fasilitator

Fasilitator merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pemberdayaan ini. Oleh karenanya diperlukan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh fasilitator, diantaranya adalah :

- a. Memiliki komitmen dan empati terhadap proses pemberdayaan perempuan
- b. Memiliki kemampuan untuk membantu dan mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai
- c. Mampu menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
- d. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan diantara warga belajar
- e. Menguasai dan mampu mentransfer materi/ pokok-pokok bahasan dari setiap sesi pertemuan.
5. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan sekolah pemberdayaan ini dibutuhkan modul Pemberdayaan Perempuan Perkebunan berbasis Kebutuhan Strategis Gender yang didalamnya telah memperinci berbagai materi, metode, dan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga diperlukan media berupa : ATK, Kertas Plano, Papan Tulis, dan LCD Viewer

#### **Langkah IV : Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi, serta keberhasilan proses pembelajaran, meliputi 2 hal, yakni (1) pelaksanaan sekolah secara kuantitas, meliputi jumlah pertemuan, jumlah peserta, ketersediaan media, sarana prasarana dan sebagainya. (2) Evaluasi terkait dengan hasil dari proses pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur perubahan pemikiran dan sikap, serta perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan. Tidak menutup kemungkinan evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta sekolah pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif, meliputi keseluruhan pokok bahasan dalam sekolah perempuan berdaya.

#### **Langkah V : Pengoperasian**

Pemberdayaan perempuan perkebunan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih adil gender. Merupakan proses membentuk kelompok perempuan buruh perkebunan menuju penguatan dan kemandirian untuk menyampaikan pendapat dan alternatif kebijakan, peningkatan akses dan kontrol, kemampuan berfikir kritis, adil dan demokratis yang bersperspektif gender dengan cara yang partisipatif. Pengorganisasian ini

merupakan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Perempuan Berdaya.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengorganisasian ini adalah :

1. Identifikasi pihak-pihak, masalah, analisis dampak dan ancaman;
2. Analisis potensi dan kebutuhan;
3. Pembagian peran sesuai analisis kebutuhan;
4. Bangun aliansi dengan berbagai kelompok yang lebih besar atau dengan publik yang lebih luas;
5. Menjalankan fungsi organisasi :
  - a. Memelihara solidaritas perempuan perkebunan.
  - b. Membangun dan memelihara pertukaran informasi.
  - c. Membangun mekanisme perubahan sebagai upaya pencapaian pemberdayaan perempuan perkebunan.

#### **Langkah VII : Kegiatan Kelompok**

Pelaksanaan kegiatan kelompok ditentukan bersama saat perencanaan program organisasi. Kegiatan-kegiatan organisasi akan bermuara kepada perubahan masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan :

- a. Penentuan prioritas kegiatan.
- b. Merencanakan waktu, disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki buruh perempuan PTPN XII Kebun Silosanen.
- c. Penyediaan alat pemantauan dan evaluasi, berupa matriks kegiatan yang dilengkapi dengan target, waktu, dan indikator.

#### **Langkah VII : Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan dalam keseluruhan proses pengorganisasian. Dalam hal ini digunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif.

1. Kualitatif

Secara kualitatif pengorganisasian perempuan buruh Perkebunan Silosanen ini berhasil jika ada indikator :

  - a. Peningkatan kontrol perempuan dalam kehidupan di lingkup domestik maupun di ruang publik.
  - b. Peningkatan partisipasi dalam setiap rangkaian proses pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sampai kepada manfaat yang bisa dinikmati bersama-sama dengan laki-laki.
  - c. Perubahan pola pikir perempuan dan tumbuhnya kesadaran kritis perempuan untuk mengubah kondisi yang timpang menjadi lebih adil gender.
  - d. Semakin banyak akses yang dimiliki perempuan terhadap sumberdaya, informasi, dan fasilitas-fasilitas lain baik, yang tersedia di alam, masyarakat, maupun yang disediakan oleh negara.
  - e. Peningkatan kesejahteraan perempuan yang ditandai dengan terjaminnya hak-hak perempuan, terutama hak untuk hidup layak.
2. Kuantitatif

Secara kuantitatif, indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan proses pemberdayaan ini adalah:

- a. Terbentuknya organisasi perempuan buruh perkebunan.
- b. Jumlah anggota yang terus bertambah.
- c. Tersusunnya rencana kegiatan organisasi.
- d. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

### **Kesimpulan**

Perempuan di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen belum bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh semua warga negara. Hak untuk mengembangkan diri, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas kepastian hukum dan keadilan belum didapatkan oleh perempuan buruh PTPN XII Silosanen.

Mereka juga mengalami ketidakadilan berupa marginalisasi dalam bidang ekonomi. Juga subordinasi, dimana perempuan selalu ditempatkan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki. Buruh perempuan juga harus menanggung beban ganda, berupa tugas-tugas dalam rumah tangga, dimana mereka harus menjalankan fungsi reproduksi, sekaligus ikut dalam aktifitas produktif untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Anggapan-anggapan negatif berupa stereotip terhadap perempuan juga membuat kondisi perempuan lebih terpuruk. Ditambah dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di lingkup domestik maupun ketika mereka berada di ruang publik.

Untuk itu perlu adanya perubahan relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat perkebunan. Perempuan buruh kebun perlu mendapatkan kekuasaan untuk mengontrol kehidupannya, mendapatkan akses terhadap sumberdaya dan informasi. Model pemberdayaan yang cocok untuk perempuan buruh perkebunan PTPN XII Silosanen adalah melalui sekolah perempuan berdaya dan pengorganisasian. Sekolah perempuan berdaya diharapkan akan mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih sensitif gender. Sedangkan perorganisasian dibutuhkan sebagai langkah yang strategis untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh kebun, untuk melakukan diskusi-diskusi dan sharing dalam upaya membangun kesadaran gender, dan sekaligus sebagai alat bargain terhadap pihak perkebunan, perusahaan, maupun di masyarakat.

Program pemberdayaan perempuan perkebunan berbasis kebutuhan strategis gender ini adalah program jangka panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, yakni masyarakat, laki-laki dan perempuan, ormas, orsospol, aparat desa, dan pemerintah. Untuk itu menjadi penting melibatkan berbagai pihak dalam proses sekolah perempuan berdaya maupun pengorganisasian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk perbaikan hidup masyarakat yang lebih berkeadilan gender.

### **Daftar Pustaka**

- Claros, Augusto Lopez dan Zahidi, Saadia. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. World Economic Forum. Diakses dari situs :[www.weforum.org](http://www.weforum.org), pada 11 Maret 2013
- Darwin, Muhadjir, M. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Demartoto, Argyo dan Budiati, Atik Catur. 2010. *Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan Dikirim Ke Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar)*, Laporan Penelitian. <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>, diakses pada 10 Maret 2013
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyono, Joko. 2010. "Kebijakan Pemberdayaan perempuan Melalui Kebutuhan Strategis dan Praktis Gender", *Jurnal Inspirat*, Edisi 1, Tahun 1, Nomor 1, Januari-Juni
- Simatauw, Meentje, dkk. 2001. *Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Sebuah Panduan Analisis*. Kupang: Yayasan PIKUL.
- Subhan, Zaitunah. 2002. *Menanggulangi Budaya Marjinalisasi di Perusahaan, dalam Mimif Hidayat dan Edi Junaedi (Ed): Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*. Jakarta: El KAHFI.

### Akses Internet

- Data BPS, 2011, <http://www.bps.go.id/>, diakses pada 11 Maret 2013.
- Data Disbun Jatim 2013, Tenaga kerja, <http://www.disbun.jatimprov.go.id/tenagakerja.php>., diakses pada 11 Maret 2013.
- Data Disbun, 2011, Data Komoditi Kopi, [http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi\\_kopi.php](http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi_kopi.php), diakses pada 11 Maret 2013.
- Data KPU, 2009, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Diakses pada 11 Maret 2012.
- Departemen Kehutanan, 2005, *Pengarusutamaan Gender Lingkup Departemen Kehutanan*. Jakarta: Departemen Kehutanan. [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_sej\\_022470\\_chapter5.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022470_chapter5.pdf), diakses pada 11 Maret 2013
- PTPN XII Silosanen, <http://www.disbun.jatimprov.go.id/dbdata/dwnlad/stakeholder/ptpnxiiwili/PTPN%20XII%20WIL%20II-UUS%20Silosanen.pdf>, diakses pada 11 Maret 2013. <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=209>